

Merajut Kualitas Islami: Strategi Transformasi Sistem Penjaminan Mutu PAI Menuju Madrasah Ibtidaiyah Unggul

A'imatul Kutbaniyah¹, Romi Faslah²

aimatulkutbaniyah@gmail.com¹, romi@uin-malang.ac.id²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia^{1,2}

ARTICLE INFO

Article history:

Received, November 06th, 2025

Revised, November 18th, 2025

Accepted, November 20th, 2025

Keywords:

Quality Assurance System,
Islamic Education, Islamic
Quality, Excellent Madrasah

Conflict of Interest:

None

Funding:

None

ABSTRACT

Madrasah Ibtidaiyah (MI) has a mandate to enlighten the mind and purify the soul, but still faces a dilemma of quality when Islamic Religious Education (PAI) is predominantly cognitive-verbalistic in orientation and the Internal Quality Assurance System (SPMI) tends to be stuck in administrative routines. This study aims to formulate a Strategy for the Transformation of SPMI PAI through the development of an Islamic Quality Culture (IQC) Model that shifts the function of SPMI from document compliance to an instrument for character building and Islamic excellence. The method used is Library Research with conceptual-critical analysis. This method is carried out through a systematic search of books, scientific articles, regulations, and SPMI documents to build a relevant transformation model. The results of the study produced an IQC Model that integrates the PDCA (Plan-Do-Check-Act) quality cycle with Islamic values such as itqan and amanah. This model emphasizes PAI quality standards that cover the cognitive, affective, and psychomotor domains, so that SPMI is able to encourage real improvements in learning and realize excellent and character-building MI.

Corresponding Author: A'imatul Kutbaniyah, Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia, Email: aimatulkutbaniyah@gmail.com.



Copyright©2025, Author(s)

1. Pendahuluan

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum sekaligus pendidikan agama. Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah lembaga pendidikan dasar Islam yang setara dengan Sekolah Dasar (SD). Sejak awal berdirinya, MI mengemban mandat ganda yang sakral, yaitu mencerdaskan akal dan menyucikan spiritual peserta didik. Lembaga ini menjadi pilar penting dalam membentuk generasi awal yang kompeten secara akademik serta memiliki akidah dan akhlak yang kuat.

Namun, di tengah arus globalisasi dan meningkatnya persaingan antar lembaga pendidikan, MI kerap menghadapi dilema kualitas. Tantangan terbesar terletak pada upaya menyeimbangkan pendalaman nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan standar pendidikan kontemporer yang semakin kompleks (Karmila et al., 2025, p. 297).

Dalam prakteknya, Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak sekadar menjadi mata pelajaran tambahan di Madrasah Ibtidaiyah (MI), tetapi merupakan inti identitas yang membedakan madrasah dari sekolah umum. Keberadaan PAI diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 37 yang menetapkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Fantofik & Sirait, 2025). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, yang menegaskan bahwa PAI menjadi fondasi pembentukan akhlak dan karakter peserta didik MI (Farid & Hatami, 2022).

Meskipun demikian, proses pembelajaran PAI masih sering terjebak pada pendekatan kognitif-verbalistik sehingga belum sepenuhnya mampu menjembatani antara penguasaan teori dan pembentukan karakter. Permasalahan ini semakin relevan dalam konteks era disrupsi, yaitu periode perubahan cepat akibat kemajuan teknologi digital yang menggeser pola belajar, perilaku sosial, serta nilai-nilai yang dianut masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana MI mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia di tengah perubahan sosial yang begitu cepat (Hidayat et al., 2021, pp. 217–218).

Kegagalan internalisasi nilai dalam pembelajaran PAI banyak dipengaruhi oleh stagnasi metodologi yang masih digunakan guru di kelas. Tuntutan era Revolusi Industri 4.0 yang mengharuskan guru PAI bertransformasi menjadi *murabbi* sekaligus inovator teknologi sering kali tidak sejalan dengan praktek nyata, misalnya guru masih jarang menggunakan media digital interaktif dalam menyampaikan materi akhlak atau fiqih. Di banyak MI, pengajaran PAI masih didominasi ceramah dan hafalan, padahal metode inovatif seperti *Project-Based Learning* berbasis nilai contohnya proyek “Gerakan Jumat Berkah” untuk menumbuhkan kepedulian sosial atau gamifikasi menggunakan kuis digital seperti Quizizz dan Wordwall dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Minimnya integrasi literasi digital juga tampak ketika siswa tidak diajak menganalisis isu kontemporer, seperti etika penggunaan media sosial atau praktek konsumsi yang berlebihan, padahal hal tersebut sangat relevan dengan pendidikan karakter Islam. Kondisi ini menyebabkan materi PAI yang kaya nilai disampaikan melalui pendekatan yang usang sehingga siswa cenderung cerdas secara teoretis tetapi lemah dalam pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata (Jazuli & Sukhoiri, 2024).

Pemerintah telah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai instrumen vital untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo. PP 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang SPMI. Namun,

dalam prakteknya, SPMI di banyak MI justru terperosok ke dalam “jebakan administratif”. Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sering kali dipersempit menjadi ritual pemenuhan dokumen untuk kebutuhan akreditasi, bukan sebagai mekanisme peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan. Fokus yang berlebihan pada aspek administrasi ini membuat esensi mutu PAI yakni penguatan proses pembelajaran dan pembentukan karakter kurang mendapat perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi penjaminan mutu yang berjalan belum secara eksplisit menyentuh kekhasan PAI dan gagal mendorong perubahan kultural menuju *Islamic Quality Culture* yang diharapkan (Putri Paputungan & Roskina Mas, 2021, p. 78).

Kualitas PAI sangat bergantung pada kompetensi guru, namun guru PAI dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Tuntutan untuk menjadi seorang *murabbi* (pendidik jiwa) dan sekaligus *inovator* teknologi seringkali kontradiktif dengan minimnya pelatihan metodologi modern dan penguasaan literasi digital. Kesenjangan ini menciptakan kerentanan mutu: materi PAI yang kaya nilai disampaikan dengan metode monoton, menjauhkan siswa dari pemahaman Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap isu-isu krusial saat ini (Kurniawan et al., 2024, p. 355).

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, penelitian ini secara tegas memfokuskan diri pada Strategi Transformasi Sistem Penjaminan Mutu PAI di Madrasah Ibtidaiyah. Fokus utamanya adalah bagaimana SPMI bertransisi dari sekadar memenuhi standar menjadi menciptakan standar keunggulan Islami yang baru, terutama dalam menjamin mutu proses dan hasil belajar yang menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik. Studi-studi sebelumnya cenderung membahas manajemen mutu madrasah secara umum atau keterkaitan SPMI dengan mata pelajaran umum. Perbedaan fundamental (*novelty*) penelitian ini adalah penekanan eksplisit pada SPMI PAI sebagai domain spesifik. Penulis akan menyajikan model *Islamic Quality Culture* yang mengintegrasikan penjaminan mutu dengan nilai-nilai Islam, memberikan panduan praktis tentang bagaimana SPMI dapat menjadi alat pembentuk karakter, bukan hanya alat kontrol administrasi (Khoiroh et al., 2025, pp. 79–81).

Penelitian ini memiliki urgensi kritis karena membongkar stagnasi mutu PAI dan menawarkan solusi yang berlandaskan transformasi manajerial. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi peta jalan strategis bagi pengambil kebijakan dan kepala madrasah. Tujuannya bukan hanya sekadar membantu MI meraih akreditasi "A", tetapi yang jauh lebih penting, adalah mewujudkan Madrasah Ibtidaiyah Unggul yang mampu mencetak lulusan berkarakter kuat, cerdas, dan siap menjadi agen perbaikan moral bangsa.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep dan Landasan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah

Manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi melalui proses perbaikan kinerja dan peningkatan mutu kerja yang berkelanjutan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang sesuai, atau bahkan melampaui, kebutuhan dan harapan masyarakat (pelanggan), dengan menekankan pada penjaminan proses agar hasil pendidikan mencapai standar mutu dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien, melibatkan unsur-unsur pokok manajemen seperti manusia, barang, mesin, metode, uang, dan pasar yang saling berinteraksi (Ristianah & Ma'sum, 2022, pp. 47–48).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), yang diatur dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, didefinisikan sebagai mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan berupa kesatuan unsur organisasi, kebijakan, dan proses terpadu untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Dalam konteks madrasah, di mana Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi inti kurikulum, penerapan SPMP sangat relevan karena harus memastikan SNP tercapai sekaligus menjamin mutu dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan (Khoiri, 2021, pp. 39–42).

Mutu pendidikan merupakan pilar krusial bagi pembangunan nasional dan masa depan bangsa, sebab pendidikan yang bermutu hanya dapat terwujud melalui sekolah atau madrasah yang bermutu. Oleh karena itu, peningkatan dan penjaminan mutu lembaga pendidikan menjadi titik strategis. Untuk mencapai sekolah/madrasah yang bermutu, pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai PP Nomor 19 Tahun 2005, yang meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan (Khotimah et al., 2023, pp. 289–290).

Selanjutnya mengenai penerapan *Total Quality Management* (TQM) dalam Pendidikan Islam merupakan strategi manajemen komprehensif yang bertujuan meningkatkan mutu, menjamin keberhasilan siswa, serta mempertahankan keselarasan dengan nilai-nilai Islam, di mana TQM adalah filosofi yang menempatkan kualitas sebagai fokus utama dalam setiap tahap proses organisasi dan menjadikannya tanggung jawab seluruh anggota lembaga, bukan hanya satu departemen. Sem Adapun Prinsip-prinsip kunci *Total Quality Management* (TQM) yang terintegrasi dalam Lembaga Pendidikan Dasar Islam meliputi (Hendri et al., 2022, pp. 190–195):

a. Kepemimpinan dan Keterlibatan Menyeluruh

Kepemimpinan yang kuat dan keterlibatan menyeluruh dari seluruh komponen lembaga menjadi fondasi utama dalam penerapan *Total Quality*

Management (TQM) pada madrasah. Manajemen puncak, seperti Kepala Madrasah dan Yayasan, perlu menunjukkan pemahaman serta komitmen penuh terhadap seluruh proses peningkatan mutu. Seluruh tenaga kependidikan, baik guru maupun staf administrasi, juga harus terlibat secara aktif agar potensi mereka dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kerja tim yang solid melalui kolaborasi vertikal, horizontal, maupun lintas fungsi diperlukan untuk memastikan setiap upaya perbaikan mutu berjalan secara terpadu.

b. Fokus Pelanggan dan Kualitas Proses

Penerapan TQM menuntut madrasah untuk menempatkan kepuasan pelanggan baik internal seperti siswa maupun eksternal seperti orang tua dan masyarakat sebagai prioritas utama. Semua proses pendidikan harus dirancang dan dikelola secara efektif dengan menekankan pada perbaikan berkelanjutan dan pencegahan masalah sebelum terjadi. Mutu desain program pendidikan, mulai dari kurikulum hingga metode pembelajaran, perlu diperhatikan sejak awal agar mampu memenuhi harapan pelanggan. Selain itu, kemampuan memberikan respons cepat dalam layanan administrasi maupun akademik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan mereka.

c. Perbaikan Berkelanjutan dan Pengambilan Keputusan Faktual

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang konsisten, madrasah perlu membangun budaya perbaikan berkelanjutan sebagai tujuan permanen. Setiap keputusan strategis hendaknya berbasis pada data dan fakta melalui analisis informasi yang akurat. Penggunaan metode statistik untuk memantau kondisi, hasil belajar, dan kinerja lembaga menjadi sangat penting agar proses evaluasi berjalan objektif. Dengan demikian, indikator kinerja yang relevan harus dikembangkan untuk memudahkan monitoring sekaligus memberi dasar bagi pemberian penghargaan atau tindak lanjut perbaikan.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan

Pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek krusial dalam TQM, yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh tenaga kependidikan. Madrasah juga perlu menghargai kontribusi karyawan serta memanfaatkan pengalaman para ahli sebagai bagian dari proses pengembangan organisasi. Perubahan budaya kerja secara adaptif harus dilakukan agar lembaga mampu merespons dinamika lingkungan secara cepat. Selain itu, kemitraan internal maupun eksternal perlu dibangun untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Upaya standarisasi praktek terbaik, penilaian diri secara berkala, perencanaan strategis, dan pengelolaan proses sebagai satu kesatuan sistem menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi mutu dan keberlanjutan pengembangan lembaga.

Adapun penerapan *Total Quality Management* (TQM) yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan ini memiliki keterkaitan erat dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di Indonesia. Jika SPMP (sebagaimana diatur oleh Permendikbud) berfungsi sebagai mekanisme

normatif dan sistemik yang mewajibkan lembaga pendidikan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka TQM berfungsi sebagai landasan filosofis dan strategi manajemen yang menyediakan alat, teknik, serta budaya yang dibutuhkan untuk menjalankan siklus SPMP tersebut secara efektif dan efisien di dalam madrasah (Suryani, 2024).

Sistem penjaminan mutu di madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) memiliki landasan hukum yang saling terkait dan hierarkis. Regulasi dasarnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 yang menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan minimum mutu yang harus dicapai oleh seluruh satuan pendidikan. Kemudian, Permendikbud No. 28 Tahun 2016 mengatur kerangka operasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mewajibkan satuan pendidikan melaksanakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) untuk memenuhi atau melampaui SNP. Secara spesifik untuk madrasah, SNP tersebut diperkuat dan dikontekstualisasikan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 624 Tahun 2021 yang mengatur Standar Nasional Pendidikan dan Bahasa Arab pada Madrasah. KMA ini memastikan bahwa dimensi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab sebagai inti kurikulum madrasah tercakup dalam standar mutu yang harus dijamin melalui SPMI. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa sistem mutu madrasah tidak hanya bertujuan memenuhi standar umum pemerintah, tetapi juga secara normatif diwajibkan menjamin mutu aspek keislaman (PAI), sebuah pemenuhan yang bersifat kritik karena menyangkut tujuan utama didirikannya madrasah (Annisa Nurfadlila Putri & Deshinta, 2024, pp. 250–251).

Secara filosofis, upaya menjaga mutu PAI di Madrasah Ibtidaiyah (MI) didasarkan pada konsep *Islamic Quality Culture* (IQC), di mana budaya mutu (perbaikan berkelanjutan, disiplin, dan tanggung jawab) berakar pada nilai-nilai religius. TQM, yang secara umum mendorong perbaikan, diadaptasi menjadi sebuah dorongan moral-spiritual. Nilai-nilai seperti Ihsan (melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, seolah-olah dilihat oleh Allah) menjadi dasar untuk mencapai kualitas tertinggi. Contoh konkretnya adalah disiplin waktu (kedatangan, pelaksanaan pembelajaran, penyelesaian kurikulum) yang dipandang sebagai nilai mutu yang sejalan dengan syariat, di mana shalat lima waktu dilaksanakan tepat waktu (M. A. Majid, 2023). Dengan demikian, penjaminan mutu PAI di MI harus dijaga melalui sistem formal (SPMI) karena ia bukan hanya kewajiban regulasi (normatif), tetapi juga merupakan tanggung jawab keagamaan (*amanah*) untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan ilmu agama yang terjamin mutunya, menjadikannya sebuah urgensi filosofis dan *raison d'être* (alasan keberadaan) lembaga pendidikan Islam itu sendiri.

B. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu PAI di Madrasah Ibtidaiyah

Lembaga Pendidikan Dasar Islam, seperti halnya madrasah, mengemban tugas suci untuk menjamin mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sebuah ikhtiar terstruktur sesuai amanat regulasi. Proses ini berputar dalam siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang teratur. Awalnya, dilakukanlah Evaluasi Diri Madrasah (EDM), ibarat cermin yang jujur, memantulkan kelebihan dan kekurangan institusi, dan hasil diagnosis ini secara kritis menjadi fondasi kokoh bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), merangkai strategi peningkatan mutu di hadapan. Dalam aksi nyata, madrasah tak henti-henti menempa diri, menyelenggarakan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan mendalam, merajut ilmu dan metodologi baru agar proses belajar mengajar kian bermakna (Aman et al., 2025, pp. 512–513).

Langkah pengawasan pun tak luput, berupa supervisi akademik dan manajerial yang berkelanjutan, memastikan langkah guru dan staf selaras. Puncaknya, segala upaya ini diukur secara cermat melalui sistem pelaporan berbasis indikator, menakar seberapa jauh delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah tercapai, sebuah kesungguhan dalam menjaga kualitas pendidikan demi masa depan generasi. (Setiawati, 2021) Namun, perlu dicermati, efektivitas SPMI ini terletak pada kejujuran EDM agar RKAM tak sekadar dokumen di atas kertas, serta pada keberanian manajemen untuk menggunakan hasil evaluasi bukan hanya sebagai laporan, melainkan sebagai palu godam pengendalian yang melahirkan peningkatan mutu sejati. Terkait dengan penerapannya di madrasah ibtidaiyah sebagai berikut (Husna & Thoyib, 2021):

1. Penetapan Standar

Penetapan standar mutu di Madrasah Ibtidaiyah (MI) bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sebuah proses strategis yang menentukan arah kualitas lembaga secara menyeluruh. Peran pelaku pendidikan di tahap ini sangat menentukan: kepala madrasah berfungsi sebagai *policy maker* yang mengarahkan kebijakan mutu berbasis kebutuhan kontekstual madrasah; guru sebagai *academic executor* memastikan standar yang ditetapkan dapat diterjemahkan dalam praktek pembelajaran yang nyata; sedangkan komite dan orang tua bertindak sebagai *stakeholder* pengendali sosial mutu (Fuad & Sesmiarni, 2025, pp. 7–8).

Contoh konkret penerapan standar mutu dalam pembelajaran PAI ialah penyusunan indikator capaian yang tidak hanya mengukur aspek kognitif seperti pemahaman ayat, tetapi juga afektif dan psikomotorik, seperti konsistensi dalam melaksanakan shalat berjamaah dan perilaku sosial sesuai nilai Islam.

2. Pemetaan Mutu

Pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Madrasah (EDM) berfungsi sebagai cermin kritis terhadap kinerja lembaga. Proses ini tidak boleh berhenti pada pengisian instrumen semata, tetapi harus menjadi ruang reflektif bagi seluruh pelaku madrasah untuk menganalisis secara mendalam kesenjangan antara standar dan realitas lapangan (Pranata et al., 2023, pp. 37–38).

Kepala madrasah memegang fungsi analitis dalam membaca data EDM sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Guru di sisi lain berperan sebagai *reflective practitioner* yang menilai kembali efektivitas strategi pembelajaran yang telah diterapkan. Misalnya, ketika hasil EDM menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa PAI masih rendah, guru perlu menganalisis penyebab pedagogisnya apakah karena metode ceramah yang terlalu dominan, atau kurangnya integrasi nilai Islam dalam aktivitas berpikir tingkat tinggi. Praktek mutu yang bersifat analitis dalam konteks ini dapat berupa forum refleksi guru (*lesson study*) untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran PAI berbasis *problem solving* keislaman.

3. Perencanaan Pemenuhan Mutu

Tahap perencanaan mutu di madrasah unggul ditandai oleh penggunaan pendekatan sistemik dan partisipatif. Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, melainkan hasil analisis data mutu yang objektif. Kepala madrasah berperan sebagai *strategic planner* yang mengintegrasikan data hasil EDM ke dalam kebijakan program peningkatan mutu. Guru menjadi *change agent* dalam mengonversi rencana menjadi inovasi pedagogik. Sementara tenaga kependidikan menjamin efisiensi sistem pendukung dan pengelolaan sumber daya.

Perencanaan mutu menuntut setiap program disusun berdasarkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), serta mengandung elemen inovatif. Contohnya, perencanaan kegiatan PAI berbasis proyek sosial seperti “Gerakan Madrasah Bersedekah” tidak hanya memperkuat spiritualitas siswa, tetapi juga menjadi sarana evaluasi implementatif terhadap nilai kepedulian sosial.

4. Pemenuhan Mutu

Implementasi mutu di madrasah unggul merupakan tahap pembuktian komitmen semua pelaku terhadap prinsip *quality culture*. Kepala madrasah harus tampil sebagai *instructional leader* yang tidak sekadar mengawasi, tetapi juga membimbing guru dalam menerapkan inovasi pembelajaran. Guru diharapkan tidak bersikap mekanis terhadap kurikulum, melainkan adaptif dan reflektif terhadap kebutuhan peserta didik.

Praktek mutu yang bersifat analitis terlihat, misalnya, dalam pembelajaran PAI berbasis proyek dengan tema “Etika Digital dalam Perspektif Islam.” Melalui pendekatan ini, guru tidak hanya mengajarkan norma agama, tetapi juga mengajak siswa mengkaji isu aktual dengan sudut pandang kritis dan religius. Selain itu, pelibatan tenaga kependidikan dalam memastikan lingkungan belajar bersih, tertib, dan religius menunjukkan bahwa mutu tidak berhenti pada ruang kelas, melainkan menjadi ekosistem madrasah yang menyeluruh.

5. Evaluasi dan Penetapan Standar Baru

Evaluasi mutu dalam perspektif kritis bukan sekadar pengukuran hasil, tetapi juga analisis terhadap proses, efektivitas kebijakan, dan relevansi program terhadap kebutuhan nyata siswa. Madrasah unggul menerapkan evaluasi dengan pendekatan triangulasi data menggabungkan hasil observasi, penilaian kinerja guru, umpan balik siswa, serta survei persepsi orang tua untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang mutu pendidikan. Contoh bentuk konkret evaluasi di Madrasah Ibtidaiyah antara lain:

- a. Supervisi akademik berbasis refleksi, di mana kepala madrasah bersama guru melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI, kemudian mengadakan diskusi reflektif untuk menilai kesesuaian antara rencana dan praktek.
- b. Analisis hasil belajar komprehensif, mencakup penilaian kognitif (pemahaman materi), afektif (perilaku religius), dan psikomotorik (praktek ibadah).
- c. Forum evaluasi partisipatif, melibatkan guru, komite, siswa, dan orang tua dalam memberikan umpan balik terhadap efektivitas program pembinaan karakter dan kegiatan keagamaan.
- d. Refleksi data berbasis instrumen digital, seperti rekap hasil ujian, absensi kegiatan ibadah, dan dokumentasi proyek PAI untuk menganalisis tren peningkatan mutu secara longitudinal.

Secara spesifik dari pelaksanaan SPM yang ada di atas, implementasi SPM PAI bertujuan memastikan bahwa keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran PAI memenuhi standar mutu yang ditetapkan madrasah, yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Bentuk penerapannya merujuk pada beberapa hal (Suhendar, 2024, pp. 904–907):

1. Perencanaan Pembelajaran PAI yang Sistematis dan Bernilai Spiritual

Penerapan sistem penjaminan mutu menuntut perencanaan pembelajaran yang tidak hanya sistematis tetapi juga sarat makna., perencanaan pembelajaran PAI dimulai dari penyusunan perangkat yang lengkap mencakup RPP, silabus, pemetaan kompetensi dasar, dan KKM. Namun yang paling penting, perencanaan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa mutu pendidikan tidak semata-mata diukur dari aspek kognitif siswa.

Guru diharapkan menetapkan sasaran yang berimbang antara kecakapan akademik dan pembentukan karakter Islami, seperti peningkatan hafalan Al-Qur'an, praktek ibadah, serta internalisasi akhlak mulia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen mutu berfungsi untuk menata kembali orientasi pendidikan agama: dari sekadar penyampaian informasi menuju pembentukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perencanaan yang matang menjadi jantung sistem mutu, karena ia menjamin bahwa setiap langkah pembelajaran terarah pada tujuan yang eksplisit dan bernuansa spiritual.

2. Pelaksanaan Pembelajaran PAI yang Kontekstual dan Berorientasi Nilai

Tahapan pelaksanaan menjadi arena nyata bagi implementasi mutu. Guru PAI dalam penelitian ini tidak hanya mengajar sesuai kurikulum, tetapi berupaya menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Proses belajar dirancang untuk menghidupkan nilai-nilai Islam, bukan hanya menjelaskan dogma. Guru menggunakan media pembelajaran yang menarik, menciptakan lingkungan belajar yang aktif, dan menumbuhkan partisipasi siswa melalui kegiatan keagamaan di dalam maupun luar kelas. Hal ini memperlihatkan bahwa mutu pembelajaran tidak ditentukan oleh banyaknya materi yang tersampaikan, melainkan oleh sejauh mana pembelajaran mampu mengubah cara berpikir dan bersikap siswa. Sistem penjaminan mutu dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme yang menegakkan disiplin pedagogis sekaligus ruang refleksi spiritual memastikan bahwa proses belajar berlangsung efektif secara akademik dan bermakna secara moral.

3. Pengorganisasian Pembelajaran yang Koordinatif dan Terstruktur

Manajemen mutu dalam PAI tidak dapat berjalan apabila setiap komponen bekerja secara terpisah. Penelitian ini menekankan pentingnya pengorganisasian yang solid antara guru, kepala madrasah, dan wakil kurikulum. Sinergi ini tampak dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti mushola, proyektor, literatur Islam, dan alat bantu pembelajaran visual.

Pengorganisasian ini memperlihatkan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab individu guru, melainkan hasil kerja kolektif lembaga. Ketika koordinasi berjalan dengan baik, pembelajaran menjadi lebih efisien, terarah, dan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Hal ini memperlihatkan pergeseran penting: guru tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan bagian dari sistem mutu yang saling terkait, di mana setiap unsur memiliki fungsi spesifik dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang Islami dan unggul (Rokhmah & Subh, 2025, pp. 32–34).

4. Pengawasan sebagai Mekanisme Reflektif dan Perbaikan Berkelanjutan

Pengawasan dalam sistem penjaminan mutu bukan sekadar pengendalian formal, melainkan bagian dari proses reflektif yang mendorong peningkatan berkelanjutan. Kepala madrasah dalam penelitian ini melakukan supervisi yang berorientasi pada pembinaan, bukan sekadar pemeriksaan. Guru PAI diajak meninjau kembali efektivitas strategi pengajarannya, menilai relevansi metode, serta mengidentifikasi kendala pembelajaran.

Pendekatan ini menggeser paradigma pengawasan dari pola “menilai kesalahan” menjadi “menemukan potensi perbaikan”. Ketika pengawasan dijalankan dengan pola hubungan profesional yang terbuka, budaya mutu tumbuh secara alami karena guru merasa dihargai sebagai mitra peningkatan kualitas, bukan sebagai objek kontrol. Siklus ini mencerminkan prinsip dasar mutu: bahwa setiap proses harus selalu terbuka terhadap evaluasi dan penyempurnaan.

5. Evaluasi Pembelajaran sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Sistem Mutu

Evaluasi dalam konteks mutu tidak berhenti pada pencapaian angka, melainkan berfungsi sebagai cermin keberhasilan seluruh sistem pembelajaran. Guru PAI melakukan penilaian yang terencana dan menyeluruh, mencakup penyusunan indikator, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil, serta tindak lanjut berupa remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM.

Perbedaan pada praktek ini dari penilaian konvensional adalah maknanya: evaluasi dimaksudkan untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran berhasil menumbuhkan kesadaran beragama dan perilaku Islami siswa. Dengan demikian, evaluasi menjadi wujud nyata tanggung jawab moral lembaga terhadap hasil pendidikannya. Mutu tidak lagi dipahami sebagai pencapaian administratif, melainkan sebagai komitmen untuk memastikan bahwa setiap siswa berkembang secara utuh berpengetahuan, beriman, dan berakhlak (Nur Dhuka, 2022, p. 295).

Dalam perakteknya implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di madrasah ibtidaiyah menuntut keterlibatan aktif seluruh komponen sekolah. Kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan komite madrasah memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan. Kepala madrasah berfungsi sebagai penggerak utama yang memastikan setiap program berjalan sesuai dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Guru berperan dalam menerjemahkan standar mutu ke dalam praktek pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi spiritual, sosial, dan akademik siswa. Tenaga kependidikan memastikan administrasi dan data mutu terkelola secara akurat, sementara komite madrasah bertindak sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan dukungan sumber daya (Rohmat & Yuslam, 2022).

Implementasi mutu di madrasah tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik, tetapi juga pada penguatan karakter religius dan keterampilan abad ke-21. Misalnya, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), guru menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Qur'ani. Salah satu contoh konkret adalah pembelajaran materi akhlak dengan metode *problem solving* berbasis kisah Nabi. Guru menstimulasi siswa untuk menganalisis permasalahan moral dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai keislaman dan ajaran Al-Qur'an. Proses ini bukan hanya meningkatkan daya berpikir kritis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual yang mendalam (Pranata et al., 2023).

Selain itu, praktek mutu juga tampak pada upaya madrasah dalam melakukan refleksi kolektif setelah setiap siklus pembelajaran. Guru bersama kepala madrasah mengkaji hasil belajar dan perilaku siswa untuk menilai efektivitas pendekatan yang digunakan. Jika ditemukan kelemahan, seperti rendahnya partisipasi siswa atau ketimpangan hasil belajar, maka dilakukan tindak lanjut melalui pelatihan guru, perbaikan perangkat ajar, atau kolaborasi antar guru

untuk berbagi praktek terbaik. Dengan demikian, SPMI di Madrasah Ibtidaiyah bukan sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi instrumen transformasi yang menumbuhkan budaya reflektif dan inovatif di lingkungan sekolah dasar Islam (Pranata et al., 2023).

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi SPMI di Madrasah Ibtidaiyah bergantung pada sejauh mana para pelaku pendidikan memiliki komitmen dan kompetensi mutu. Tanpa adanya kesadaran kolektif dan kepemimpinan partisipatif, sistem mutu akan berhenti pada tataran formalitas.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Studi Pustaka (*Library Research*) dengan fokus pada analisis konseptual-kritis (Suwardi & Syaifullah, 2022). Studi pustaka dipilih karena tujuan penelitian adalah merumuskan model transformatif dan konseptual (*Model Islamic Quality Culture*) yang mensinergikan manajemen mutu dan nilai-nilai PAI. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah mendalam (hermeneutik) terhadap berbagai teori, konsep, regulasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan filosofi pendidikan Islam. Melalui pembacaan yang kritis, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi celah antara standar nasional pendidikan dengan kebutuhan penjaminan mutu PAI pada dimensi afektif dan psikomotorik, sehingga mutu dipahami bukan hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai strategi spiritual dalam membangun madrasah unggul.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen akademik yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah bereputasi, peraturan dan regulasi pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan SPMI, serta hasil penelitian terdahulu mengenai manajemen mutu madrasah. Pengumpulan data dilakukan melalui proses telaah literatur secara sistematis, mencakup identifikasi, klasifikasi tema (misalnya, manajemen mutu, SPMI, karakter PAI), interpretasi makna, dan sintesis konseptual. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi konsistensi informasi dari berbagai literatur otoritatif. Tahap akhir analisis adalah konstruksi model konseptual yang menjadi fokus utama (novelty) penelitian, yaitu Model Transformasi Sistem Penjaminan Mutu PAI yang mengintegrasikan penjaminan mutu dengan kekhasan dan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (Amruddin Amruddin, Itha Leanni Muskananfolo, and Erna Febriyanti, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," ed. Arif Munandar (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 9–14.).

4. Hasil dan Pembahasan

A. Strategi Transformasi SPMI PAI Dengan Model *Islamic Quality Culture* (IQC)

Peningkatan mutu pendidikan diposisikan sebagai pilar strategis dalam melahirkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter, di mana ukurannya melampaui capaian akademik semata menuju pembentukan Budaya Mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu di sini diartikan sebagai internalisasi nilai-nilai

positif seperti kedisiplinan, tanggung jawab, keterbukaan, evaluasi berkelanjutan, dan kolaborasi dalam aktivitas harian warga sekolah. Dalam konteks Strategi Transformasi SPMI PAI Dengan Model *Islamic Quality Culture* (IQC), konsep Manajemen Mutu Berbasis Sekolah (MBS) hadir sebagai kerangka implementasi yang efektif. MBS menawarkan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengelola sumber daya secara mandiri dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi mutu. Pendekatan partisipatif ini sangat krusial karena menumbuhkan rasa memiliki dan akuntabilitas, menjadikan perbaikan mutu sebagai budaya yang melekat, yang sejalan dengan semangat Ihsan dalam *Islamic Quality Culture* yang menuntut kesempurnaan dalam beramal (A. Majid & Arifin, 2025).

Terkait dengan keberhasilan penguatan budaya mutu melalui MBS ditopang oleh strategi yang terstruktur, yaitu membangun visi dan misi secara partisipatif, menyusun rencana kerja yang terukur, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta menciptakan komunikasi yang efektif antarpihak. Strategi ini fundamental untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan akuntabilitas sebagai fondasi budaya mutu. Di era digital, implementasi MBS diperkuat melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, transparansi pengambilan keputusan, dan akses informasi, menjamin bahwa proses peningkatan mutu berjalan secara cepat dan tepat. Akhirnya, peran Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah adalah kunci sentral dalam menggerakkan warga sekolah menuju budaya kerja yang produktif, efisien, dan mengintegrasikan nilai-nilai mutu dalam setiap aspek pengelolaan. Dengan demikian, penerapan MBS berfungsi sebagai mekanisme operasional yang membumikan nilai-nilai Ihsan dalam Model *Islamic Quality Culture*, memastikan bahwa mutu pendidikan berkelanjutan dapat dicapai, menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berkarakter baik.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash (28): 77

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Dalam surah Al-Qashash Ayat 77 menyajikan sebuah panduan aksiologis yang mengintegrasikan spiritualitas dengan tindakan praktis, menjadi fondasi bagi realisasi Ihsan dan pencapaian mutu yang paripurna. Ayat ini memerintahkan manusia untuk menggunakan segala karunia dan nikmat Tuhan, termasuk kekayaan duniawi, sebagai

modal utama dalam mencari ganjaran di negeri akhirat, tetapi secara seimbang juga mengingatkan agar tidak melupakan bagian atau kebutuhan di dunia. Ini menunjukkan bahwa mutu (Ihsan) dalam beramal adalah upaya holistik yang tidak menghendaki penarikan diri dari kehidupan material, melainkan pengelolaan sumber daya duniawi untuk tujuan yang lebih tinggi, sekaligus memenuhi hak-hak yang adil. (Efendi, 2022, p. 112).

Transformasi ini mensyaratkan pergeseran epistemologis mutu dimana mutu bukan lagi dilihat sebagai hasil dari kontrol birokrasi, melainkan hasil dari kebiasaan kolektif yang terinternalisasi (kultura). Dalam IQC, siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) diangkat dari sekadar alat audit menjadi mekanisme spiritual-manajerial. Kualitas yang dituntut adalah al-Jaudah, yaitu kesempurnaan yang melibatkan dimensi ruh (jiwa) dan jism (fisik/mechanisme), sehingga segala proses di madrasah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, didasari oleh nilai transenden. Model IQC memberikan penegasan konseptual mengenai integrasi tiga nilai fundamental Islam ke dalam struktur operasional SPMI, sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini (Sodikin et al., 2024):

Tahapan PDCA	Nilai IQC	Deskripsi dan Integrasi Nilai Islami
P (Plan) – Perencanaan	Tauhid, Amanah, Kolaborasi	Perencanaan mutu dilakukan dengan menempatkan Tauhid sebagai landasan, di mana visi dan misi disusun secara partisipatif untuk mencapai <i>ridha</i> Allah SWT, bukan sekadar target duniawi. Amanah (tanggung jawab) diterapkan dengan menyusun rencana kerja yang jelas, terukur, dan transparan. Kolaborasi diwujudkan dengan melibatkan seluruh pihak (guru, orang tua, masyarakat) dalam penetapan standar dan program mutu.
D (Do) – Pelaksanaan	Akhlaq/Ihsan, Keteladanan, Keadilan, Ikhlas	Pelaksanaan program mutu dijiwai oleh praktek Ihsan (berbuat yang terbaik/sempurna). Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan Keteladanan (<i>uswah hasanah</i>) sebagai metode utama pembentukan akhlak. Keadilan diimplementasikan dalam distribusi sumber daya, perlakuan terhadap siswa berkebutuhan khusus, dan penyediaan akses yang setara terhadap fasilitas seluruh aktivitas didasarkan pada Ikhlas sebagai motivasi utama.
C (Check) – Evaluasi	Amanah, Akuntabilitas, Ihsan	Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Amanah di hadapan Allah. Tahap ini mencakup Pengawasan yang efektif dan penilaian

Tahapan PDCA	Nilai IQC	Deskripsi dan Integrasi Nilai Islami
		berkala terhadap capaian akademik serta pembentukan karakter/akhlak peserta didik. Akuntabilitas dijaga melalui proses pengambilan keputusan yang transparan. Evaluasi harus jujur dan komprehensif, mencerminkan kualitas kinerja (<i>Ihsan</i>) yang telah dilakukan.
A (Action) - Tindak Lanjut	Perbaikan Berkelanjutan, Keadilan, Kolaborasi	Tindak lanjut berfokus pada Perbaikan Berkelanjutan (seperti <i>kaizen</i> dalam TQM) untuk meningkatkan kualitas SDM dan perubahan kultur madrasah. Keputusan perbaikan dilakukan secara adil dan transparan, memastikan sumber daya dialokasikan untuk kebutuhan prioritas. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat diperkuat untuk menjamin setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pendidikan.

Dengan demikian, Strategi Transformasi SPMI PAI melalui Model *Islamic Quality Culture* (IQC) merealisasikan tujuan fundamental bahwa menuju Madrasah Ibtidaiyah Unggul bukanlah tentang meraih akreditasi "A" semata, tetapi tentang menjamin bahwa setiap proses di madrasah mencerminkan kualitas tertinggi (*Itqan*) dan tanggung jawab moral (*Amanah*) yang pada akhirnya mengarahkan pada kebaikan universal (*Ihsan*). Seluruh siklus PDCA mulai dari perencanaan yang berlandaskan Tauhid dan Kolaborasi, pelaksanaan yang menonjolkan Keteladanan dan Keadilan, evaluasi sebagai bentuk Akuntabilitas dan Ikhlas, hingga tindak lanjut yang berfokus pada Perbaikan Berkelanjutan menegaskan bahwa mutu adalah implementasi ibadah total (*kaffah*). IQC memastikan bahwa manajemen mutu terpadu dalam pendidikan PAI mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki karakter dan spiritualitas yang kokoh, sehingga sistem penjaminan mutu menjadi praktek nyata yang membawa keberkahan dan membangun peradaban yang lebih baik.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Penjaminan Mutu PAI

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah, sebagaimana dicerminkan dari studi kasus dari beberapa jurnal yang ada, menghadapi serangkaian faktor penghambat yang sangat relevan untuk ditelaah dalam konteks transformasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unggul, terutama pada penjaminan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI) antara lain (Akhyar, 2024):

a) Rendahnya Pemahaman terhadap Konsep Manajemen Mutu Pendidikan Islam

Rendahnya literasi mutu di kalangan kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan merupakan akar dari lemahnya penerapan sistem penjaminan mutu. Fenomena ini tidak sekadar mencerminkan kekurangan pengetahuan teknis, tetapi menunjukkan adanya defisit kesadaran epistemologis tentang pentingnya mutu sebagai nilai inti pendidikan Islam. Ketika manajemen mutu hanya dipahami sebatas administratif, maka proses pembelajaran cenderung kehilangan orientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang sejatinya berakar dari konsep *ishlah* dan *itqan* dalam Islam. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi juga menandakan bahwa lembaga pendidikan Islam belum menempatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai prioritas strategis. Padahal, keberhasilan sistem penjaminan mutu justru bergantung pada transformasi mindset seluruh warga madrasah. Oleh karena itu, pemahaman mutu tidak boleh berhenti pada aspek prosedural, tetapi harus dikontekstualisasikan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual pendidik terhadap amanah pendidikan.

b) Kualitas dan Kompetensi Guru yang Belum Optimal

Guru adalah jantung dari sistem mutu pendidikan. Namun, rendahnya kualifikasi akademik dan profesionalisme guru di banyak madrasah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia belum menjadi fokus utama kebijakan pendidikan Islam. Ketika guru tidak memiliki kualifikasi S1 atau mengajar di luar bidang keahliannya, pembelajaran menjadi bersifat mekanis dan minim inovasi. Situasi ini memperlihatkan adanya *paradoks mutu*: madrasah menginginkan output yang unggul, tetapi input SDM tidak mendukung. Selain itu kurangnya pelatihan tentang pendekatan pembelajaran berbasis mutu memperparah ketimpangan antara harapan kurikulum dan realitas kelas. Guru yang tidak dibekali pemahaman pedagogis tentang evaluasi, refleksi, dan inovasi pembelajaran sulit menjadi agen perubahan. Karena itu, peningkatan mutu guru tidak dapat lagi dilakukan secara parsial atau insidental, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu yang menempatkan guru sebagai *subjek pembaru*, bukan sekadar pelaksana kebijakan.

c) Ketidaksesuaian antara Kurikulum dan Implementasinya dalam Pembelajaran PAI

Kurikulum PAI sering kali gagal terimplementasi secara utuh karena terjebak dalam dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Guru belum sepenuhnya mampu melakukan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pelajaran umum, sehingga pembelajaran kehilangan dimensi spiritualnya. Padahal, dalam perspektif manajemen mutu Islam, kurikulum semestinya bersifat integratif dan holistic menggabungkan dimensi *'ilm* (pengetahuan) dan *akhlaq* (nilai).

Kelemahan implementasi kurikulum ini mengindikasikan bahwa sistem mutu belum berhasil mengawal kesinambungan antara perencanaan (rencana

kurikulum) dan pelaksanaan (praktek belajar). Artinya, manajemen mutu di madrasah tidak hanya gagal dalam aspek teknis, tetapi juga dalam *koherensi filosofis* antara visi Islam dan realitas pendidikan. Kesenjangan ini menuntut transformasi desain kurikulum yang bukan hanya menstandarkan hasil belajar, tetapi juga menumbuhkan karakter religius dan integritas spiritual siswa.

d) Terbatasnya Dukungan Pendanaan

Minimnya sumber daya keuangan merupakan hambatan klasik namun substansial dalam pengembangan mutu madrasah. Namun, masalah ini tidak semata karena kekurangan dana, melainkan juga akibat lemahnya manajemen keuangan yang visioner. Banyak madrasah cenderung reaktif terhadap kekurangan dana, tanpa upaya strategis mencari alternatif pembiayaan berkelanjutan. Dalam konteks penjaminan mutu, dana bukan hanya faktor pendukung, tetapi bagian dari sistem yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan produktif. Ketergantungan pada sumbangan masyarakat tanpa diversifikasi sumber dana menunjukkan rendahnya inovasi kelembagaan. Oleh karena itu, perlu paradigma baru bahwa keterbatasan finansial bukan alasan stagnasi mutu, melainkan tantangan untuk menciptakan *ekosistem pendanaan partisipatif* berbasis kemandirian dan kolaborasi.

e) Rendahnya Kesadaran Akan Pentingnya Perubahan

Kendala terbesar dalam reformasi mutu pendidikan bukanlah kekurangan sumber daya, melainkan resistensi terhadap perubahan. Banyak kepala madrasah dan guru yang merasa nyaman dengan pola lama yang statis, sehingga menolak inovasi manajerial. Fenomena ini menandakan adanya *krisis kesadaran transformasional* di lingkungan pendidikan Islam. Ketika perubahan tidak dipandang sebagai bagian dari ibadah ilmiah (*amal shalih fi al-'ilm*), maka pembaruan mutu akan selalu dianggap ancaman, bukan peluang. Kondisi ini menunjukkan perlunya kepemimpinan madrasah yang inspiratif dan transformative kepemimpinan yang mampu menanamkan kesadaran bahwa perubahan bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab spiritual terhadap kualitas umat.

f) Kurangnya Dukungan dari Pemangku Kepentingan

Kegagalan penerapan sistem penjaminan mutu sering kali terjadi karena madrasah bekerja secara terisolasi, tanpa dukungan nyata dari masyarakat, orang tua, maupun Kementerian Agama. Dalam perspektif sistem, mutu tidak akan tercapai jika hanya diupayakan oleh satu subsistem. Madrasah membutuhkan kolaborasi sistemik dengan semua pihak untuk menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan. Rendahnya komunikasi dan keterlibatan stakeholder menunjukkan bahwa mutu belum menjadi kesadaran sosial, melainkan masih dianggap tanggung jawab internal sekolah semata. Oleh sebab itu, diperlukan strategi komunikasi pendidikan yang persuasif dan partisipatif agar semua pihak memahami bahwa keberhasilan sistem mutu merupakan keberhasilan bersama dalam membentuk generasi Islami yang unggul.

g) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana yang tidak memadai bukan sekadar masalah fisik, melainkan simbol dari ketimpangan mutu struktural yang masih melekat pada banyak madrasah. Ketika fasilitas pembelajaran tidak layak, proses pendidikan kehilangan dimensi keteladanan profesional. Kelas yang sempit, laboratorium yang tidak berfungsi, dan perpustakaan yang minim sumber rujukan bukan hanya menghambat pembelajaran, tetapi juga menciptakan citra bahwa mutu bukan prioritas. Dalam konteks penjaminan mutu, infrastruktur harus dipahami sebagai instrumen pembentuk budaya belajar yang berkualitas. Oleh karena itu, pembenahan sarana-prasarana bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah strategis untuk menegakkan etos mutu Islami yang menekankan kebersihan, kerapian, dan keteraturan sebagai refleksi nilai *ihsan* dalam Pendidikan.

Di balik serangkaian tantangan tersebut, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang, jika dioptimalkan, dapat menjadi lokomotif transformasi menuju Madrasah Ibtidaiyah Unggul yang diharapkan yaitu (Fajar et al., 2025, pp. 32–33):

a. Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Kuat dan Berkomitmen

Kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu. Kepala madrasah yang berperan sebagai *leader* dan *change agent* mampu menanamkan semangat mutu dalam setiap aspek pengelolaan lembaga. Komitmen terhadap visi dan misi mutu menjadi pendorong bagi seluruh warga madrasah untuk bekerja dengan arah yang jelas dan terukur. Kepala madrasah yang mampu memanfaatkan otonomi sekolah secara inovatif dapat menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman. Selain itu, kepemimpinan yang berorientasi nilai-nilai Islam menumbuhkan budaya mutu yang berlandaskan spiritualitas di mana setiap individu bekerja dengan prinsip *itqan* (kesungguhan) dan berorientasi pada *continuous improvement* atau perbaikan berkelanjutan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten dan Berdedikasi

Mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru dan tenaga kependidikan. Guru yang memiliki kualifikasi akademik sesuai bidangnya serta kompetensi pedagogik dan keagamaan yang kuat akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran. Pelatihan berkelanjutan yang terencana menjadi sarana penting untuk meningkatkan profesionalitas guru agar senantiasa relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan metodologi pembelajaran modern. Guru yang berdedikasi tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga *role model* bagi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai moral dan spiritual di kehidupan nyata. Dengan demikian, guru yang kompeten berperan ganda sebagai pengembang ilmu dan penanam karakter Islami, yang merupakan esensi dari mutu pendidikan madrasah.

c. Kurikulum yang Holistik dan Relevan

Kurikulum yang holistik mencerminkan keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama, serta berorientasi pada pembentukan karakter. Keselarasan antara dokumen kurikulum dan implementasi di lapangan menjadi indikator utama efektivitas mutu pembelajaran. Melalui kurikulum partisipatif, guru dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi sehingga muncul rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil pendidikan. Kurikulum yang relevan juga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya, menjadikan pendidikan PAI tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual. Dengan demikian, kurikulum yang kuat menjadi fondasi bagi madrasah untuk mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan adaptif terhadap tantangan global. (Julaen et al., 2024)

d. Dukungan Finansial yang Optimal dan Transparan

Ketercukupan dan pengelolaan dana yang baik merupakan faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan mutu pendidikan. Dana yang terbatas tetapi dikelola secara transparan dan akuntabel dapat menghasilkan dampak maksimal jika diarahkan pada prioritas mutu seperti pelatihan guru, peningkatan sarana belajar, dan inovasi kurikulum. Madrasah juga perlu memiliki strategi kreatif dalam penggalian sumber dana, misalnya melalui kerja sama dengan alumni, lembaga zakat atau filantropi Islam, serta program ekonomi produktif berbasis madrasah. Pendekatan ini tidak hanya menambah kemandirian lembaga tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan komitmen madrasah dalam menjaga kualitas pendidikan.

e. Partisipasi dan Dukungan Aktif dari Stakeholder

Sistem penjaminan mutu tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif berbagai pihak. Dukungan penuh dari Kementerian Agama dalam bentuk pembinaan, supervisi, dan fasilitasi teknis menjadi aspek penting dalam memperkuat kapasitas manajemen mutu madrasah. Di sisi lain, keterlibatan orang tua dan masyarakat memperkuat dimensi sosial dari pendidikan Islam. Melalui komunikasi yang terbuka dan sinergi antara madrasah dan keluarga, pengawasan nilai-nilai keagamaan dapat berlangsung konsisten antara rumah dan sekolah. Dengan partisipasi stakeholder, madrasah dapat membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan berorientasi pada peningkatan kualitas spiritual, intelektual, serta moral siswa. (Setiawan et al., 2024, pp. 7-8)

f. Sarana dan Prasarana yang Memadai

Sarana pendidikan merupakan unsur vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Fasilitas seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang fungsional, dan tempat ibadah yang nyaman mendukung proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Pengelolaan sarana yang baik juga mencerminkan prinsip efisiensi dan tanggung jawab manajerial lembaga. Fasilitas pendidikan yang baik bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga simbol komitmen madrasah terhadap nilai *ihsan* yaitu memberikan yang

terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Lingkungan belajar yang tertata dengan baik dapat meningkatkan motivasi siswa dan kinerja guru, sekaligus memperkuat identitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul.

5. Simpulan

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dihadapkan pada tantangan untuk bertransformasi dari sekadar rutinitas administratif yang berorientasi dokumen menjadi mekanisme perbaikan proses belajar mengajar yang riil. Dengan mandat ganda mencerdaskan akal dan menyucikan spiritual, MI harus menjadikan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai jantung identitas dan tolok ukur keunggulan. Penelitian ini menawarkan strategi transformasi dengan berfokus pada domain spesifik SPMI PAI, menyajikan model *Islamic Quality Culture (IQC)* yang mengintegrasikan siklus mutu (PPEPP) dengan nilai-nilai Islam seperti itqan dan amanah, menjadikan mutu sebagai tanggung jawab moral-spiritual. Transformasi ini menuntut penetapan standar yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga dimensi afektif dan psikomotorik PAI, serta menempatkan guru sebagai *change agent* dan kepala madrasah sebagai *instructional leader*. Keberhasilan sistem mutu sangat bergantung pada mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi mutu dan resistensi terhadap perubahan, sambil mengoptimalkan faktor pendukung seperti kepemimpinan yang kuat dan dukungan stakeholder. Pada akhirnya, penerapan SPM yang efektif akan berdampak pada kualitas guru PAI, mewujudkan pembelajaran yang holistik dan kontekstual, dan menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara keimanan (*faith*) dan kecakapan hidup (*competence*), sehingga terwujudlah Madrasah Ibtidaiyah Unggul sebagai agen perbaikan moral bangsa.

6. Referensi

- Akhyar, Y. (2024). Faktor-faktor Penghambat Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan Islam di Marasah Aliyah Swasta. *Journal of Education Research*, 5(1), 711–717. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.917>.
- Aman, A., Yulianti, N., Handayani, W., & Naza, M. (2025). Analisis Dampak Implementasi Standar Penjaminan Mutu terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 04(03), 506–521. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v4i3.499>
- Annisa Nurfadlila Putri, A. G., & Deshinta, A. B. (2024). Konsep dan Prinsip SPMI dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah : Tinjauan Pustaka. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(4), 248–259. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i4.2758>.
- Efendi, N. (2022). Manajemen Mutu Terpadu Dalam Persepektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits. *Al - Ifkar*, 17(02), 103–127. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/5295>

- Fajar, M., Hidayati, N., Prayogi, A., & Setiawan, A. (2025). Peningkatan Kualitas Pembelajaran PAI Melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tingkat SMP. *EduGrowth: Jurnal Pendidikan Profesi Gur*, 1(1), 28–35. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/edugrowth/article/view/12452>
- Fantofik, D., & Sirait, S. (2025). Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Pandawa: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 7(3), 103–114. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/5790>
- Farid, F., & Hatami, M. H. (2022). Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 183 Tahun 2019 pada Madrasah Tsanawiyah Arrahmatul Abadiyyah Banjarmasin. *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa*, 12(1), 116–128. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.210>
- Fuad, R., & Sesmiarni, Z. (2025). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran PAI. *Dirasah*, 8(1), 1–11. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/1632>
- Hendri, H., Sukma, A. B., Makmur, F., Nurhasanah, Hasri, S., & SOhiron. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip *Total Quality Management* (TQM) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MA Terpadu Madinatul Munawwarah Pelalawan. *Tadbir Muwahhid*, 6(2), 185–206. <https://doi.org/10.30997/jtm.v6i2.6042>
- Hidayat, A., Hadi, S., & Marlin, S. (2021). Strategi Pendidikan Islam di Era Disrupsi. *MISYKAT AL-ANWAR: JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 4(2), 215–233.
- Husna, K., & Thoyib, M. (2021). Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah Berbasis Nilai-Nilai Pesantren di MA Darul Huda Mayak. *Excelencia : Journal of Islamic Education & Management*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.21154/excelencia.v1i01.92>
- Jazuli, J., & Sukhoiri. (2024). Optimalisasi Manajemen Mutu dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 8418–8429. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19735>
- Julaen, J., Supardi, S., & Lubna, L. (2024). Strategi Evaluasi Kurikulum PAI Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1617–1624. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2386>
- Karmila, E., Zainuri, A., & Yasir, M. G. (2025). Strategi Manajemen dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Islam: Studi Kasus di MI Hijriyah II Palembang. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 23(2), 248–292. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/18611>

- Khoiiri, M. Y. (2021). Urgensi Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan. *Asosiasi Dosen Tarbiyah Krempyang Tanjunganom*, 02(01), 39–48. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jiem/article/view/22>
- Khoiroh, U., Arifin, M., & Iman, D. Z. (2025). Integrasi Nilai Islam dan *Total Quality Management*: Model Pendekatan Mutu Berbasis Spiritualitas untuk Optimalisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Penelitian*, 12(2), 79–86. <https://journal.nuspublications.or.id/jpep/article/view/96>
- Khotimah, U. H., Juanda, A., & Rosidin, D. N. (2023). Implementasi Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 2 Cirebon. *Indonesian Journal of Teaching and Learning Hal*, 2(2), 285–295. <https://doi.org/10.56855/intel.v2i2.376>
- Kurniawan, S., Saputra, D., Fanani, M. A., Ratnasari, D., Uin, P., Malik, M., Malang, I., Uin, P., Malik, M., Malang, I., Uin, P., Malik, M., & Malang, I. (2024). Pengembangan Madrasah Aliyah Melalui Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan. *Al-Afkar (Journal For Islam Studies)*, 7(1), 352–363. https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/871
- Majid, A., & Arifin, M. (2025). Strategi Penguatan Budaya Mutu Melalui Manajemen Mutu Berbasis Sekolah. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 202–209. <http://jurnalinspirasimodern.com/index.php/JIM/article/view/252>
- Majid, M. A. (2023). Koagulasi Nilai: Pemikiran Membangun Budaya Mutu Madrasah (Suatu Ikhtiar Epistemologis Memajukan Lembaga Pendidikan Islam). *Journal of Nusantara Education*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.57176/jn.v3i1.82>
- Nur Dhuka, M. (2022). Perencanaan Strategis Mutu Pendidikan Agama Islam. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(5), 287–298. <https://www.jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/420>
- Pranata, A., Miranda, D. A., & Yunita, F. R. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Batanghari. *Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(02), 36–44. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/muntazam/article/view/11106>
- Putri Papatungan, I. I., & Roskina Mas, S. (2021). Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. *Pedagogika*, 12(1), 77–92. <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/pedagogika/article/view/630/142>
- Ristianah, N., & Ma'sum, T. (2022). Konsep Manajemen Mutu Pendidikan. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(01), 45–55. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v4i01.169>
- Rohmat, R., & Yuslam. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Kependidikan*, 10(1), 1–19.

<https://doi.org/10.24090/jk.v10i1.6417>

- Rokhmah, D., & Subh, I. (2025). Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP MBS Bumiayu. *An-Nafah Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 5(1), 29–36. <https://doi.org/10.64469/an-nafah.v5i2.67>
- Setiawan, A., Prabowo, G., & Aimah, S. (2024). Penjaminan Mutu Terpadu Dalam Mewujudkan Identitas Pendidikan Unggul Melalui Akreditasi. *Jurnal Mudabbir: Jurnal Reserch and Education Studies*, 4(2), 1–10. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>
- Setiawati, I. (2021). Manajemen Pengawasan Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Siswa. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(10), 211–217. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i10.220>
- Sodikin, U., Sa, M., Ibn, U., Bogor, K., Tinggi, S., & Islam, A. (2024). Nilai-Nilai Islami Dalam Manajemen Mutu Terpadu (MMT) Pendidikan Berbasis Prilaku. *CONS-IEDU: Islamic Guidance and Counseling Journal*, 04(02), 356–367. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/cons-iedu/article/view/1458>
- Suhendar, D. (2024). Implementasi Manajemen Mutu pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 3(3), 900–909. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/2381>
- Suryani, T. (2024). Implementasi *Total Quality Management* dalam Pendidikan. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 3(5), 831–840. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/3471>